

**EKSISTENSI DAN UPAYA MEREDUKSI PENGANGGURAN
DI KABUPATEN PATI**

**EXISTENCE AND EFFORTS TO REDUCE THE UNEMPLOYMENT
IN PATI REGENCY**

Suroso

Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati

Email: suroso_peneliti@yahoo.co.id

Naskah Masuk: 20 September 2016 Naskah Revisi: 26 September 2016 Naskah Diterima: 5 Oktober 2016

ABSTRACT

Unemployment is a crucial problem in the development because it can trigger other social problems. The objective of this study is to analyze existing and effort to reduce the unemployment in Pati regency. The research uses descriptive-quantitative approach. The data consist of secondary data. Data collecting is conducted by using observation. The analysis uses descriptive one. There are three main findings in the research. Firstly, Unemployment is caused by many determinant factors. Secondly, the rate of unemployment based on productive age is 8,62% in the study area. Thirdly, the rate of unemployment based on head-household is 2,08% in the study area. To reduce unemployment, it is better for the local government to conduct the efforts which are relevant to the local contexts including the demand for labour, the supply of labor and the optimalization of sub-district role in community empowerment.

Keywords: *employment, labor force, unemployment.*

ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah serius dalam pembangunan karena pengangguran dapat memicu permasalahan sosial lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan upaya pengurangan pengangguran di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data penelitian menggunakan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Ada 3 temuan utama dalam studi ini. Pertama, pengangguran disebabkan berbagai faktor determinan. Kedua, tingkat pengangguran berdasarkan usia produktif sebesar 8,62% di Kabupaten Pati. Ketiga, tingkat pengangguran berdasarkan kepala keluarga (KK) sebesar 2,08% di Kabupaten Pati. Guna mereduksi pengangguran, pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya yang sesuai dengan konteks lokal meliputi permintaan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja dan optimalisasi peran desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *lapangan kerja, pengangguran, tenaga kerja*

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan masalah serius dalam pembangunan. Pengangguran cenderung berbanding terbalik atau berkorelasi negatif terhadap ketersediaan lapangan kerja. Semakin besar ketersediaan lapangan kerja, semakin kecil potensi tingkat pengangguran. Sebaliknya semakin sedikit pertumbuhan lapangan kerja, semakin besar potensi tingkat pengangguran. Terkait lapangan kerja, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang yang berada pada usia kerja memiliki kesempatan yang sama menjadi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. UU No 13 Tahun 2003 menyatakan “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tetapi kenyataan dan realitas menunjukkan bahwa sebagian orang atau penduduk sulit memperoleh pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja sehingga sebagian terpaksa menjadi pengangguran.

Reynolds *et al* (1986) menyatakan pengangguran berpotensi membawa dampak pada berbagai aspek (multi-sektor). Aspek-aspek yang akan terkena langsung adalah kesehatan dan pendidikan, karenanya sebagian beban biaya pendidikan dan kesehatan harus ditanggung pemerintah. Bila pengangguran berlangsung cukup lama, maka kemiskinan absolut bisa meluas.

Dampak lain dari pengangguran di antaranya : **(a)** *ketimpangan sosial*, sebagian komunitas masyarakat menganggur dan sebagian lain masyarakat dapat bekerja dengan normal bahkan memperoleh penghasilan yang berlebih; **(b)** *kecemburuan sosial*, ketimpangan pendapatan, status sosial dan kekuasaan; **(c)** meningkatnya beban *budget* pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan; **(d)** meningkatnya *kriminalitas* dan kekerasan sosial lainnya, **(e)** munculnya sikap *permisif* (serba boleh) sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup; **(f)** potensi kendala sistem demokrasi, karena *money politic* lebih dominan; **(g)** *disharmonis* sistem rumah tangga, karena penopang kelangsungan rumah tangga (penghasilan) tidak memadai; **(h)** meningkatnya *sex komersial* (pelacuran), sebagai representasi sulitnya mencari lapangan kerja; **(i)** melemahnya *daya beli*, sebagai konsekuensi langsung dari ketidakberdayaan ekonomi (rendahnya pendapatan rumah tangga); **(j)** Pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional/daerah, tingginya pengangguran menyebabkan turunnya produk domestik bruto (PDB) nasional/daerah akan mengalami penurunan; dan **(k)** pengangguran menghambat investasi, jumlah tabungan masyarakat ikut menurun.

Mengingat pengangguran memiliki dampak serius ke berbagai sektor maka masalah pengangguran sangat penting untuk mendapat perhatian yang serius. Berkaitan dengan harapan tersebut, studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis eksistensi dan upaya mereduksi pengangguran di Kabupaten Pati. Hasil analisis diharapkan dapat mendukung

kebijakan dan menanggulangi pengangguran di Kabupaten Pati.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Determinan Pengangguran

Pengertian “Pengangguran” adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor determinan. *Pertama*, pengangguran disebabkan perubahan struktural. Menurut Reynolds *et al* (1986), jenis pengangguran ini terjadi karena *mismatch* (tak sepadan/ketidacocokan) antara kualifikasi pekerja yang membutuhkan pekerjaan dengan persyaratan yang diinginkan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diamati dari dominasi kontribusi sektoral terhadap produksi nasional (*regional*). Bila sektor industri memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB dibanding dengan sektor lainnya, maka struktur perekonomian tersebut membutuhkan tenaga kerja paling besar (Sukirno, 1985). Suatu negara atau daerah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri. Dampak selanjutnya, adalah dibutuhkannya kualifikasi tenaga kerja yang cocok di sektor tersebut. Ketika persyaratan ini tidak terpenuhi (*mismatch*), maka tenaga kerja yang tersedia tidak terpakai, kecuali ada penyesuaian kualifikasi sesuai kebutuhan.

Kedua, adanya hambatan (ketidاكلancaran) bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja (*pengangguran friksional*). Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis

(misalnya waktu dan tempat). Sering terjadi pencari kerja tidak memiliki informasi yang memadai tentang lowongan kerja yang tersedia, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memenuhi lowongan kerja tersebut. Mungkin juga karena situasi kerja (tempat) yang ditempati tidak cocok dengan harapan si pencari kerja, sehingga membuat pudarnya semangat kerja. Pengangguran jenis ini bisa juga terjadi karena perkembangan (dinamika) ekonomi yang terus berubah sehingga membawa dampak terhadap permintaan tenaga kerja. Artinya, situasi demikian sangat dibutuhkan tenaga kerja yang mampu mengikuti perubahan jaman dengan cepat serta mampu melakukan adaptasi keahlian terhadap tuntutan lingkungan eksternal yang dinamis tersebut. Bila situasi ini tidak bisa diikutinya, maka ia akan kehilangan kesempatan kerja (Sukirno, 1985).

Ketiga, rendahnya aliran investasi. Investasi merupakan komponen *aggregate demand* yang mempunyai daya ungkit terhadap perluasan kesempatan kerja. Melalui mekanisme efek multiplier, perubahan investasi membawa dampak terhadap kenaikan *output*. Ada beberapa faktor yang mempunyai dampak terhadap meningkatnya output yaitu pengeluaran konsumsi otonom, investasi otonom, pengeluaran pemerintah dan ekspor (Gordon, 1993). Secara otomatis meningkatnya output akan membutuhkan sumberdaya untuk proses produksi (modal, tenaga kerja dan input lainnya). Dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika terjadi peningkatan dalam pengeluaran otonom. Hubungan antara kenaikan output dengan permintaan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja) dapat dijelaskan dengan konsep elastisitas

penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 1985).

Keempat, rendahnya tingkat keahlian. Keahlian dan produktifitas sangat berkaitan erat. Tenaga kerja yang memiliki keahlian akan memiliki produktifitas tinggi, karena ia mampu memanfaatkan potensi dirinya dalam kegiatan ekonomi produktif. Guna meningkatkan keahlian dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya adalah melalui pendidikan dan latihan, magang, pendidikan formal, dan untuk membangkitkan kecerdasan tenaga kerja lewat pembinaan motivasi kerja dan *corporate learning* (percepatan belajar perusahaan) (Reynolds *et al*, 1986; Rose and Nicholl, 2002).

Kelima, *diskriminasi*. Diskriminasi bisa terjadi pada berbagai aspek lain, seperti sektor pendidikan, ekonomi, hukum, agama dan lainnya. Ketika perlakuan diskriminatif terjadi di bidang ekonomi, maka kemungkinan dampak yang akan dirasakan adalah hilangnya kesempatan berusaha dan kesulitan akses pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (modal, alam, informasi, dll). Situasi diskriminasi akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Ketenagakerjaan akan sulit berkembang ketika perlakuan diskriminatif di bidang ekonomi masih berlangsung. Demikian juga bila akses pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak diberikan seluas-luasnya kepada publik, dampak selanjutnya adalah terpuruknya kualitas SDM, dan dalam jangka panjang kesempatan akan sulit diraih oleh tenaga kerja (Simanjuntak, 1985).

Keenam, laju pertumbuhan penduduk. Ada persoalan krusial pertumbuhan kependudukan bila tidak disertai kondisi yang baik diantaranya: (a) tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, (b) rendahnya anggaran pendidikan, (c)

rendahnya tingkat kesehatan, (d) tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, (e) rendahnya pembentukan modal, (f) rendahnya kualitas tenaga kependidikan, (g) rendahnya balas jasa di sektor pendidikan (gaji, honor, jasa riset dsb), (h) rendahnya daya beli masyarakat, (i) minimnya sumberdaya ekonomi yang bisa dieksploitasi, (j) masih rendahnya pemahaman tentang arti penting pendidikan, dan (k) rendahnya fasilitas dan kualitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Sebagian besar negara berkembang dihadapkan pada persoalan kependudukan yang serius yang pemecahannya sangat kompleks sekali (Kindleberger and Herrick, 1977).

Ketujuh, *aggregate demand unemployment*. Pengangguran ini muncul karena rendahnya permintaan output ekonomi, sehingga selanjutnya berdampak pada rendahnya permintaan tenaga kerja (*low derived demand*). Sebaliknya, bila permintaan output tinggi (*high aggregate demand*), bukan hanya akan menghilangkan pengangguran jenis ini, tetapi justru akan tercipta lebih banyak lagi kesempatan kerja, bahkan situasi ini dapat mengurangi pengangguran struktural dan friksional yang terjadi sebelumnya (Rose and Nicholl, 2002).

Korelasi Pengangguran dan Kinerja Ekonomi

Pengangguran dan kinerja ekonomi memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan negatif antara kesenjangan *output* riil (kinerja ekonomi) dengan *output* potensial terhadap pengangguran digambarkan oleh hukum Okun. Okun dalam Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk setiap 2 persen kemerosotan *Gross National Product* (GNP) faktual dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen. Ada studi terdahulu membuktikan bahwa

kinerja ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif yaitu bila kinerja ekonomi naik maka tingkat pengangguran menurun dan bila kinerja ekonomi menurun maka pengangguran meningkat.

Pertama, Noor *et al* (2007) meneliti tentang keberadaan hukum Okun di perekonomian Malaysia terkait hubungan negatif antara pengangguran dan *output* (GDP). Dari penelitian tersebut mereka menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *output* dan pengangguran di mana koefisien yang diperoleh adalah -1.748 dan diketahui bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan *output* di Malaysia. Uji Kausalitas Granger juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara variabel pengangguran dan *output*.

Kedua, Petkov (2008) menguji koefisien Okun di Inggris. Petkov menggunakan alat analisis *Auto Regressive Distributed Lag Model* (ARDL) dengan pendekatan Hodrick-Prescott filter (Filter HP). Pendekatan ini digunakan Petkov untuk menangkap fenomena dengan menerapkan *Error Correction Model* (ECM) untuk mendapatkan koefisien Okun. Petkov membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan *output* dan pengangguran. Namun koefisien Okun yang ditemukan Petkov nilainya berbeda dari versi asli koefisien Okun.

Ketiga, Arshad (2010) menggunakan *gap equation* dan teknik Filter HP. Ditemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara PDB dan pengangguran dalam jangka pendek yang menguatkan hukum Okun. Untuk jangka panjang, digunakan Uji Kointegrasi dan ECM menunjukkan bahwa PDB dan pengangguran terkointegrasi satu sama lain dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki lokus di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Variabel penelitian mencakup pengangguran berbasis KK dan pengangguran berbasis usia produktif. Data penelitian menggunakan data sekunder berasal dari dinas/instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Usia Produktif dan Angkatan Kerja

Data Disdukcapil (2015) penduduk usia produktif (15-64 th) sebanyak Kabupaten Pati akhir tahun 2015 sebanyak 905.592 orang. Usia produktif sebagian masuk kategori angkatan kerja dan sebagian lain bukan angkatan kerja. Penduduk usia produktif yang bukan angkatan kerja (tidak membutuhkan kerja) mencakup penduduk berstatus sebagai ibu rumah tangga (IRT), pelajar dan pensiun. Kumulatif usia produktif yang bukan angkatan kerja sebanyak 276.508 orang dengan rincian: (a) mengurus rumah tangga 147.185 orang; (b) usia produktif sebagai pelajar dan atau mahasiswa 127.437 orang dan (c) usia produktif berstatus sebagai pensiun sebanyak 1.886 orang.

Kemudian Penduduk usia produktif (15-64 th) yang masuk kategori angkatan kerja 629.084 orang yang meliputi: (a) angkatan kerja dan bekerja sebanyak 574.866 orang dan usia produktif yang berstatus penganggur (tidak bekerja) 54.218 orang. Eksistensi penduduk usia produktif di Kabupaten Pati ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1.
Eksistensi dan Distribusi Usia Produktif di Kabupaten Pati Tahun 2015

No	Kecamatan	Ibu R.tangga	Pelajar /Mhs	Pensiun U _≤ 64	Kerja (15-64th)	Tidak Kerja	Usia Prod.
1	Sukolilo	6.561	6.187	21	40.669	6.661	60.099
2	Kayen	8.069	8.858	37	31.766	2.824	51.554
3	Tambakromo	4.641	4.745	40	25.952	2.080	37.458
4	Winong	5.825	5.848	52	28.656	2.637	43.018
5	Pucakwangi	2.933	3.370	39	23.122	2.595	32.059
6	Jaken	5.179	3.747	28	21.414	2.001	32.369
7	Batangan	7.018	3.499	23	18.964	1.310	30.814
8	Juwana	14.678	11.018	57	37.939	1.723	65.415
9	Jakenan	3.554	5.074	28	23.243	1.034	32.933
10	Pati	11.735	12.786	844	46.935	4.020	76.320
11	Gabus	4.557	5.975	38	29.779	2.332	42.681
12	Margorejo	4.566	5.686	181	30.179	2.082	42.694
13	Gembong	6.584	4.735	63	19.342	2.435	33.159
14	Tlogowungu	6.315	4.771	56	23.446	2.419	37.007
15	Wedarijaksa	6.860	5.694	72	28.604	2.674	43.904
16	Trangkil	6.850	7.127	60	27.401	1.887	43.325
17	Margoyoso	9.202	6.290	54	30.578	5.098	51.222
18	Gn.wungkal	2.998	3.027	12	19.236	1.467	26.740
19	Cluwak	7.367	4.169	37	18.951	2.111	32.635
20	Tayu	11.081	8.083	96	26.621	3.219	49.100
21	Dukuhseti	10.612	6.748	48	22.069	1.609	41.086
Kab. Pati		147.185	127.437	1.886	574.866	54.218	905.592

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pati (2015)

Eksistensi Pengangguran Berbasis Usia Produktif

Disdukcapil (2015) menyatakan bahwa penduduk usia produktif (15-64 th) sebanyak 905.592 orang dan penduduk usia produktif yang tidak membutuhkan kerja yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, pelajar dan pensiun sebanyak 276.508 orang. Kemudian Penduduk usia produktif

yang membutuhkan kerja sebanyak 629.084 orang. Sebagian Penduduk usia produktif yang membutuhkan kerja dalam status belum/tidak mendapatkan kerja sehingga menganggur sebanyak 54.218 orang. Ini berarti agregat proporsi pengangguran berbasis usia produktif sebesar 8,62%. Kondisi pengangguran berdasarkan penduduk usia produktif ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2.
Pengangguran Berbasis Usia Produktif di Kabupaten Pati Tahun 2015

No	Kecamatan	Usia Prod.	IRT,Pljr Pensiun	Butuh Kerja	Kerja (Juml)	Tidak Kerja	% Penganggur
1	Sukolilo	60.099	12.769	47.330	40.669	6.661	14,07
2	Kayen	51.554	16.964	34.590	31.766	2.824	8,16
3	Tambakromo	37.458	9.426	28.032	25.952	2.080	7,42
4	Winong	43.018	11.725	31.293	28.656	2.637	8,43
5	Pucakwangi	32.059	6.342	25.717	23.122	2.595	10,09
6	Jaken	32.369	8.954	23.415	21.414	2.001	8,55
7	Batangan	30.814	10.540	20.274	18.964	1.310	6,46
8	Juwana	65.415	25.753	39.662	37.939	1.723	4,34
9	Jakenan	32.933	8.656	24.277	23.243	1.034	4,26
10	Pati	76.320	25.365	50.955	46.935	4.020	7,89
11	Gabus	42.681	10.570	32.111	29.779	2.332	7,26
12	Margorejo	42.694	10.433	32.261	30.179	2.082	6,45
13	Gembong	33.159	11.382	21.777	19.342	2.435	11,18
14	Tlogowungu	37.007	11.142	25.865	23.446	2.419	9,35
15	Wedarijaksa	43.904	12.626	31.278	28.604	2.674	8,55
16	Trangkil	43.325	14.037	29.288	27.401	1.887	6,44
17	Margoyoso	51.222	15.546	35.676	30.578	5.098	14,29
18	Gn.wungkal	26.740	6.037	20.703	19.236	1.467	7,09
19	Cluwak	32.635	11.573	21.062	18.951	2.111	10,02
20	Tayu	49.100	19.260	29.840	26.621	3.219	10,79
21	Dukuhseti	41.086	17.408	23.678	22.069	1.609	6,80
	Kab. Pati	905.592	276.508	629.084	574.866	54.218	8,62

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pati (2015)

Berdasarkan usia produktif, proporsi pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Margoyoso disusul Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Gembong. Kecamatan Margoyoso memiliki angkatan kerja (butuh kerja) sebanyak 35.676 orang dan angkatan kerja menganggur sebanyak 5.098 orang maka tingkat pengangguran 14,29%. Kecamatan Sukolilo memiliki angkatan kerja (butuh kerja) sebanyak 47.330 orang dan angkatan kerja menganggur sebanyak 6.661 orang maka tingkat pengangguran 14,07%. Selanjutnya Kecamatan Gembong memiliki angkatan

kerja (butuh kerja) sebanyak 21.777 orang dan angkatan kerja menganggur sebanyak 2.435 orang maka tingkat pengangguran 11,18%.

Eksistensi Pengangguran Berbasis Kepala Keluarga

Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan dengan kumulatif jumlah KK sebanyak 423.638 (Disdukcapil, 2015). Kepala Keluarga (KK) yang tidak membutuhkan kerja yang berstatus sebagai ibu rumah tangga (IRT), pelajar dan pensiun sebanyak 22.198. Kemudian Kepala keluarga (KK) yang membutuhkan kerja sebanyak 401.440

KK dengan rincian: (a) Kepala keluarga yang bekerja sebanyak 393.177 KK dan Kepala keluarga yang tidak bekerja sebanyak 8.263 KK.

Sebagian Kepala keluarga (KK) yang membutuhkan kerja dan berstatus

belum/tidak mendapatkan kerja sehingga menganggur sebanyak 8.263 KK. Ini berarti proporsi pengangguran berbasis KK sebesar 2,06 % yang berasal dari $(8.263/401.440) \times 100\%$.

Tabel 3.
Pengangguran Berbasis Kepala Keluarga di Kabupaten Pati Tahun 2015

No	Kecamatan	Juml KK	IRT,Pljr Pensiun	KK Kerja	KK Tdk Kerja	Butuh Kerja	% KK Ngganggur
1	Sukolilo	26.253	681	25.325	247	25.572	0,97
2	Kayen	23.175	1.239	21.442	494	21.936	2,25
3	Tambakromo	17.377	651	16.533	193	16.726	1,15
4	Winong	20.882	981	19.551	350	19.901	1,76
5	Pucakwangi	15.058	491	14.369	198	14.567	1,36
6	Jaken	15.885	574	15.016	295	15.311	1,93
7	Batangan	14.946	666	14.015	265	14.280	1,86
8	Juwana	30.433	1.693	28.004	736	28.740	2,56
9	Jakenan	16.360	532	15.637	191	15.828	1,21
10	Pati	36.323	4.027	31.240	1.056	32.296	3,27
11	Gabus	20.003	691	18.985	327	19.312	1,69
12	Margorejo	20.101	930	18.806	365	19.171	1,90
13	Gembong	15.092	769	14.003	320	14.323	2,23
14	Tlogowungu	17.414	808	16.324	282	16.606	1,70
15	Wedarijaksa	20.185	1.046	18.642	497	19.139	2,60
16	Trangkil	20.239	884	18.740	615	19.355	3,18
17	Margoyoso	23.768	1.340	21.829	599	22.428	2,67
18	Gn.wungkal	12.179	268	11.790	121	11.911	1,02
19	Cluwak	15.694	921	14.608	165	14.773	1,12
20	Tayu	23.027	1.674	20.684	669	21.353	3,13
21	Dukuhseti	19.244	1.332	17.634	247	17.912	1,55
Kab. Pati		423.638	22.198	393.177	8.263	401.440	2,06

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pati (2015)

Upaya Mereduksi Pengangguran Melalui Permintaan Tenaga Kerja

Upaya mengatasi pengangguran lewat jalur permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) yaitu melalui penciptaan lapangan kerja baru secara langsung. Potensi solusi Penanggulangan pengangguran melalui permintaan tenaga kerja bisa dilakukan dengan berbagai opsi yang potensial untuk menjadi solusi pengangguran.

Pertama, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam (lahan). Hal ini bisa dilakukan apabila masyarakat diberi peluang (akses) terhadap penguasaan (paling tidak) penggarapan lahan (publik). Tidak hanya sampai di situ, pemerintah pun harus memberikan fasilitasi yang kondusif agar masyarakat mampu mengelola lahan dengan optimal dan aman karena kepastian hukumnya jelas.

Kedua, peningkatan akses terhadap sumber-sumber modal. Akses pada sumber modal sangat menentukan bagi pengembangan usaha sekaligus kesempatan kerja. Ketika kemudahan-kemudahan diciptakan untuk masyarakat lapisan bawah, dan pembinaan dilakukan, maka potensi usaha ekonomi masyarakat akan berkembang.

Ketiga, peningkatan investasi atau pembentukan modal (*capital formation*). Investasi bisa bersumber dari pihak internal maupun eksternal. Dari internal bisa didapat lewat pemupukan tabungan masyarakat dan dari eksternal melalui peningkatan arus investasi (penanaman modal) dari pihak luar. Bila dua sumber ini lancar dan kenaikannya signifikan, maka ada potensi peningkatan aktivitas usaha ekonomi dan memiliki pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja).

Keempat, kerjasama pihak terkait (stakeholders). Kerjasama berbagai pihak sangat bergantung pada kredibilitas pemerintah, situasi objektif domestik seperti: peluang pasar, potensi wilayah, keamanan, politik dan kelembagaan yang mendukung sistem pemerintahan. Bila berbagai faktor tersebut kondusif, maka investor cenderung siap melakukan kerjasama pengembangan wilayah sehingga ada potensi dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja.

Kelima, perluasan pasar hasil produksi domestik. Tahap ini tercipta setelah tahap kerjasama dan arus investasi masuk ke suatu wilayah. Artinya tahap ini sebagai konsekuensi dari *existing situation* yang ada sebelumnya. Perluasan pasar dapat ditingkatkan dengan beberapa cara diantaranya dengan perbaikan kualitas, penguatan akses informasi, memahami perilaku pesaing, memahami kehendak *buyer* dan lancarnya *delivery order system*.

Keenam, pembinaan usaha ekonomi masyarakat. Ada ragam upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pembinaan usaha tetapi yang paling penting dari itu semua adalah jiwa wirausaha. Pembinaan usaha ini bisa berupa pembinaan yang bernuansa administratif seperti perijinan dan dapat pula berupa peningkatan kinerja usaha seperti peningkatan proses produksi dan orientasi pemasaran.

Ketujuh, pengembangan usaha padat karya. Usaha padat karya adalah jenis karakteristik usaha yang paling cocok untuk negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Namun ini bukan berarti menolak semua teknologi yang terus berkembang saat ini. Teknologi tetap dibutuhkan, dengan catatan tidak akan mempersulit (mempersempit) lapangan kerja baru, ramah lingkungan, terjangkau biayanya dan adaptasinya dapat dengan mudah diserap dan diimplementasi oleh tenaga kerja domestik.

Kedelapan, kebijakan pemerintah. Suasana kondusif dapat tercipta karena pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan (insentif ekonomi) bagi pengembangan usaha. Berbagai peraturan yang diciptakan bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat usaha, tidak sebaliknya (menjadikan pengusaha atau kegiatan usaha menjadi objek penghasihan semata). Pola kerja dengan pendekatan proyek (*project oriented*) harus diubah menjadi budaya *social benefit*, semua usaha yang dilakukan pemerintah tidak melulu *profit seeking* (memburu laba) dalam rangka mendongkrak *economic growth*, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana “pertumbuhan ekonomi” itu mengalir dan bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi ini bisa dilakukan dengan orientasi pembangunan sesuai dengan konteks lokal, misalnya

pembangunan infrastruktur desa dengan swakelola dan mempekerjakan masyarakat setempat.

Upaya Mereduksi Pengangguran Melalui *Supply of Labor*

Upaya mengatasi pengangguran melalui jalur *supply of labor* identik dengan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Implementasi praktis mengatasi pengangguran melalui jalur *supply of labor* menurut Reynolds *et al* (1986) dan Ehrenberg dan Smith (1988) mencakup beberapa substansi.

Pertama, peningkatan dan penguatan pendidikan dasar dan menengah (*Primary and high school education*). Mekanisme yang lazim dilakukan dalam kebijakan adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai.

Kedua, pengembangan pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi (*college and postgraduate education*). Pendanaan program ini tidak menjadi kewajiban negara sepenuhnya, tetapi subsidi anggaran di sektor ini agar disediakan.

Ketiga, *training provided by employers on the job*. Pelatihan yang disediakan langsung oleh perusahaan terkait langsung dengan pekerjaan. Program ini merupakan kebutuhan perusahaan dalam rangka penajaman tugas pekerjaan (*jobs*) yang akan langsung ditangani di perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan ini akan beragam sekali tergantung spesifikasi bidang usaha yang dikembangkan oleh perusahaan.

Keempat, *accumulated of skill through continued work experience*. Peningkatan keahlian melalui pengalaman kerja. Keahlian ini didapat bukan dari pendidikan formal tetapi

diperoleh melalui pengalaman kerja secara langsung (*learning by doing*). Akumulasi pengetahuan berbasis pengalaman memiliki kedalaman yang mantap pada bidangnya dan terkonsekuensi. Upaya kearah itu dapat dilakukan dengan kombinasi antara pendidikan formal dengan terjun langsung pada bidang usaha yang relevan.

Kelima, *Government training programs for displaced or disadvantaged workers*. Pelatihan yang dilakukan bagi pekerja yang tergeser dan kurang beruntung. Program ini bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap bekerja untuk mengganti tenaga kerja yang pensiun. Sebetulnya kondisi yang sama dapat juga dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja pengganti yang lebih produktif dan semangat baru.

Model jalur *supply of labor* sering menghadapi sejumlah hambatan diantaranya : (a) sulitnya mengukur kebutuhan *human capital*; (b) identifikasi masalah ketenagakerjaan relatif kompleks; (c) sulit diukur besar tingkat akumulasi daya serap tenaga kerja terhadap *transfer of knowledge*; (d) tidak mudah menentukan jenis pendidikan apa yang harus diberikan, kapan dan sejauh mana; dan (e) bagaimana mengukur hasil dari investasi pada SDM (Jhingan, 2000).

Upaya mereduksi pengangguran dapat dikaitkan dengan dengan konteks yang sedang berjalan adanya dana desa yang relatif besar dan memungkinkan sebagian dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dapat melakukan pelatihan ketrampilan dalam rangka menghasilkan produk sesuai potensi lokal desa. Pemberdayaan masyarakat agar disesuaikan dengan karakteristik keunikan desa. Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan

Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat, Pasal 16 menyatakan bahwa sasaran penguatan kapasitas masyarakat meliputi komunitas kawasan: (a) pedesaan terpencil; (b) pedesaan tertinggal; (c) pedesaan pesisir pantai; (d) pedesaan di pinggir hutan; (e) pedesaan dataran tinggi; (f) pedesaan daerah aliran sungai dst. Pemberdayaan masyarakat agar mengedepankan potensi lokal desa. Pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik jika ada kebijakan lokal daerah yang relevan sehingga ada harapan tercipta usaha ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang maka ada perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada reduksi pengangguran.

KESIMPULAN

Pertama, pengangguran merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan. *Kedua*, pengangguran dapat disebabkan berbagai faktor determinan. *Ketiga*, pengangguran memiliki potensi dampak negatif diberbagai sektor sosial masyarakat. *Keempat*, tingkat pengangguran berdasarkan usia produktif (15-64 th) di Kabupaten Pati sebesar 8,62%. *Kelima*, tingkat pengangguran berdasarkan kepala keluarga (KK) di Kabupaten Pati sebesar 2,08%.

Guna mereduksi pengangguran maka perlu dilakukan upaya-upaya yang relevan. *Pertama*, upaya mengatasi pengangguran lewat jalur permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) yaitu melalui penciptaan lapangan kerja baru. *Kedua*, upaya mengatasi pengangguran melalui jalur *supply of labor* yang identik dengan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) agar memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. *Ketiga*, optimalisasi peran desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk

mengembangkan wirausaha atau menjadi tenaga kerja dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshad, Z. 2010. *The Validity of Okun's Law in the Swedish Economy*. Stockholm : Departement of Economics Stockholm University.
- Ehrenberg, R.G. and R.S. Smith, 1988. *Modern Labor Economics : Theory and Public Policy*. Third Edition. Boston : Scott, Foresman and Company.
- Gordon, R.J. 1993. *Macroeconomics*. Sixth Edition. New York : Harper-Collins Publishers.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kindleberger, C.P. and B. Herrick. 1977. *Economic Development*. International Student Edition. Tokyo : Mc Graw Hill Kogakusha Ltd.
- Noor, Z. M., N. M. Nor, A. G. Judhiana. 2007. The Relationship Between Output and Unemployment in Malaysia: Does Okun's Law Exist? *International Journal of Economics and Management*, Vol 1(3) : 337-344.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007 Tentang *Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat*.
- Petkov, B. 2008. *The Labour Market and Output in the UK – Does Okun's Law Still Stand?*. Sofia : Bulgarian National Bank
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2005. *Ekonomics*. New York: McGraw Hill.

- Simanjuntak, P. J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Reynolds, L.G., S.H. Masters and C.H. Moser. 1986. *Labor Economics and Labor Relations*. Ninth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Rose, C. and M. J. Nicholl. 2002. *Accelerated Learning for The 21st Century*. Terjemahan. Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia.
- Sukirno. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

BIODATA PENULIS

Suroso, lahir 19 Maret 1966 di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gajah Mada. Bekerja di Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati sebagai Peneliti Madya.